



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Desember 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG EKO SUHARIYANTO**
2. Jabatan : **WAKIL MENTERI**
3. NHK : **182754**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.883.000.000**

1. Bangunan Seluas 29.5 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 1850 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 925.000.000
3. Tanah Seluas 1147 m2 di KAB / KOTA JEMBER, Rp. 573.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 449 m2/45 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 224.500.000
5. Tanah Seluas 4920 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.460.000.000
6. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HIBAH TANPA AKTA Rp. 750.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/330 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **2.655.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES SEDAN Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V 1.5L SE CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2.5V AT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MGH1RBPXHBD20QHVCTTS Tahun 2023,



HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

5. MOBIL, GWM TANK 500 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

1.300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

2.607.559.860

F. HARTA LAINNYA

Rp.

160.000.000

Sub Total

Rp.

13.305.559.860

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

13.305.559.860

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.